

Buletin Parlementaria

Nomor 1194/II/IV/2022 • April 2022



Komisi I Apresiasi Upaya Pussenarmed Bangun Kedekatan dengan Masyarakat



3 Puan Maharani
Apresiasi BLT Minyak
Goreng Sebagai
Solusi Jangka Pendek



5 Rapat Paripurna
Setujui Penjualan
Kapal Eks KRI Teluk
Sampit-515



9 772614 339005

Komisi I Apresiasi Upaya Pussenarmed Bangun Kedekatan dengan Masyarakat



Ketua Komisi I DPR Meutya Viada Hafid dan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Bambang Kristiono saat bertukar cenderamata dengan Komandan Pussenarmed Mayor Jenderal Totok Imam Santoso. Foto: Husein/nvl

Selain menjaga pertahanan nasional, Pusat Kesenjataan Artileri Medan (Pussenarmed), TNI AD di Cimahi, Jawa Barat, tak melupakan fungsi sosialnya, yakni membangun kedekatan dengan masyarakat. Upaya Pussenarmed itu pun mendapatkan apresiasi penuh dari Komisi I DPR RI.

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid saat meresmikan penataan Taman Kartini di Pussenarmed, Jumat (1/4), menyampaikan apresiasinya kepada Komandan Pussenarmed Mayor Jenderal Totok Imam Santoso yang telah membangun kedekatan dengan masyarakat setempat. Pada acara tersebut, Meutya secara simbolis menggunting pita dan

menandatangani prasasti.

Usai peresmian, Komandan Pussenarmed dan Tim Kunspek Komisi I DPR membagikan bingkisan untuk masyarakat setempat. “Bagaimana Pussenarmed tidak saja mengurus persenjataan dan SDM, tapi juga merangkul masyarakat. Hari ini ada peresmian Taman Kartini, mudah-mudahan ini bisa mendekatkan TNI dengan masyarakat khususnya Pussenarmed,” tutur Meutya.

Pada bagian lain, politisi Partai Golkar itu juga mengapresiasi Komandan Pussenarmed yang telah melakukan inovasi dan terobosan baru dalam pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista). Selain itu, Pussenarmed juga bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) dalam membangun alutsista.

Selain itu, menurutnya dibanding persenjataan impor yang harganya sangat mahal, maka produk persenjataan dalam negeri tetap harus diutamakan. “Pussenarmed sudah bekerja sama dengan ITB. Ini sangat bagus ketimbang impor. Dan ini sejalan dengan yang disampaikan Presiden bahwa kita fokuskan pada produk dalam negeri,” kata Meutya, seraya menambahkan, apa yang telah dilakukan Pussenarmed bisa diadopsi oleh angkatan lain.

Komisi I DPR RI juga mendukung penambahan personel profesional untuk memperkuat Pussenarmed. Hal tersebut dipandang penting sebagai bagian dari dukungan terhadap tugas pokok TNI AD. “Komisi I DPR RI mendukung Pussenarmed menambah jumlah personel dan meningkatkan kemampuan melalui pendidikan dan pelatihan,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR Bambang Kristiono.

Selain itu, Komisi I DPR sangat mengapresiasi kesiapan Pussenarmed sebagai *center of excellent* dalam menyiapkan prajurit artileri medan dan alutsista untuk mendukung tugas pokok TNI AD. Bambang menyampaikan, Komisi I segera merespon kondisi faktual Pussenarmed kepada Menteri Pertahanan dan Panglima TNI. ■ mh/aha

Puan Maharani Apresiasi BLT Minyak Goreng Sebagai Solusi Jangka Pendek

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mengapresiasi langkah pemerintah yang segera menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp300.00 pada bulan April, Mei dan Juni untuk menyikapi tingginya harga minyak goreng. Namun, Puan mengingatkan BLT Minyak Goreng ini hanyalah solusi jangka pendek.

“Kami mengapresiasi langkah pemerintah untuk menyalurkan BLT Minyak Goreng, terutama di bulan Ramadan dan menjelang Lebaran, dimana kebutuhan masyarakat terhadap berbagai komoditas, termasuk minyak goreng cukup tinggi. Sebagai solusi jangka pendek ini patut diapresiasi,” kata Puan di Jakarta, Senin (4/4).

Akan tetapi, Puan mengingatkan, untuk solusi jangka panjang, pemerintah harus membenahi seluruh tata niaga minyak goreng dari hulu sampai hilir. Politisi PDI-Perjuangan ini menjabarkan, pemerintah harus membenahi struktur pasar dan struktur industri minyak goreng. “Termasuk penguasaan dari hulu ke hilir dalam produksi minyak goreng,” ujar



Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani. Foto: Kresno/nvl

perempuan yang menjadi Ketua DPR RI pertama itu.

Puan mengingatkan, agar menjadi solusi jangka pendek menjelang Lebaran, BLT Minyak Goreng harus dilakukan dengan cepat, namun tepat sasaran. “Semakin cepat tersalurkan semakin baik untuk masyarakat. Namun juga harus semakin menutup semua potensi penyimpangan dalam penyaluran di lapangan,” kata legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah V tersebut. ■ sf



PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH
Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

PIMPINAN PELAKSANA
Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI
Irfan S. Sos, MMSI (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI
Wiryanan Narendro Putro, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)
Suciati, S.Sos. (Kasubag Analisis Media)
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

REDAKTUR
Erman Suhendri, S.Sos.I, Agung Hidayat, S.I.P, Sofyan Efendi

REDAKTUR FOTO
M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI
Guntur Dewanto, Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI
Rizka Arinindya, S.Sos, Ridwan Budiman, S.I.P, Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destiantiti, S.I.Kom, Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Naden Ivan, S.I.Kom., Ubaid Faurizal, S.I.Kom, Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Irianidi, Surahmat Eko Budi Setiantono, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiyah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonnarcha Firista Dysie, Balggys Maeshyntha, Anju Alfonce Sitomput, Zulfikar Mubien

FOTOGRAFER
Prima Danutirto, A.Md, Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiaty, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Alfdhillah, Gerald Opie, Hasri Mentari, Friederick Munchen

ANALIS MEDIA
Supian, S.E, Natasya Armanda Prihandini, S. Kom, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widjowati, Rosnita, Yoga Achmad Fauzan, Intan Putri Suciani, Riska Ramadhani

INFOGRAFIS
Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

ADMINISTRASI
Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN
Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS
Dito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom

IT MEDIA DIGITAL
Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI
Eny Sulistiawati, S.Kom (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Yudi Kresna

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunnisa, Made Chrisna Dwipa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL
CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

DPR Sahkan 2 Calon Anggota BPK Periode 2022-2027



Pimpinan DPR RI foto bersama dengan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) periode 2022-2027 terpilih. Foto: Gerald/mvl

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mengesahkan calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) periode 2022-2027 yaitu Isma Yatun dan Haerul Saleh. Sebelumnya, dua nama terpilih tersebut telah menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) oleh Komisi XI DPR RI pada 17-18 Maret 2022 lalu.

“Sekarang, perkenankan kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat. Apakah laporan Komisi XI DPR RI terhadap hasil uji kelayakan calon anggota BPK RI Periode 2022-2027 tersebut dapat disetujui?” ucap Ketua DPR RI dalam Rapat Paripurna ke-18 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 di Gedung Nusantara II,

Senayan, Jakarta, Selasa (29/3).

Di hadapan anggota dewan yang hadir baik fisik maupun virtual, Puan mengetok palu sebagai tanda resmi disahkannya calon anggota BPK RI Periode 2022-2027. Ia berharap kedua anggota BPK RI tersebut menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

“Pimpinan Dewan mengucapkan selamat kepada calon anggota BPK RI periode 2022-2027 semoga dapat menjalankan tugas dengan tanggung jawab dan amanah,” harap Puan.

Sebelum disetujui dalam Rapat Paripurna, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie O.F.P menyampaikan laporan Komisi XI DPR RI tentang hasil pembahasan uji kelayakan calon anggota BPK RI di hadapan Rapat

Paripurna DPR RI.

Dirinya menjelaskan proses seleksi calon anggota BPK RI dimulai sejak masa pendaftaran pada 29 November-8 Desember 2021 dengan jumlah pendaftar sebanyak 16 orang. Hingga pada tanggal 17-18 Maret 2022, Komisi XI DPR RI melaksanakan uji kelayakan terhadap 13 orang, lantaran 3 orang yang mengundurkan diri.

Kemudian, pada tanggal 18 Maret 2022, Komisi XI DPR RI mengambil keputusan terhadap 13 orang calon anggota BPK RI dengan dasar hasil pemungutan suara terbanyak yang dilaksanakan secara tertutup. Hasil pemungutan suara tersebut diperoleh Isma Yatun sebanyak 46 suara dan Haerul Saleh sebanyak 37 suara. ■ gal,ts/sf



Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menerima laporan dari Wakil Ketua Komisi I DPR RI Bambang Kristiono. Foto: Jaka,Kresno/nvl

Rapat Paripurna Setujui Penjualan Kapal Eks KRI Teluk Sampit-515

Rapat Paripurna DPR RI Ke-18 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021 – 2022 yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani telah memutuskan untuk menyetujui laporan Komisi I DPR RI atas Penjualan Barang Milik Negara berupa Kapal Eks KRI Teluk Sampit-515 pada Kementerian Pertahanan RI.

Dalam laporannya di hadapan Rapat Paripurna DPR RI, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Bambang Kristiono

menyampaikan, Komisi I DPR RI sebelumnya telah mendapatkan penugasan dari Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah (Bamus) tanggal 3 Februari 2022 untuk membahas persetujuan penjualan barang milik negara berupa kapal eks KRI Teluk Sampit-515 pada Kemenhan.

Lalu pada tanggal 24 Maret 2022, Bamus telah mendengarkan penjelasan dari Wakil Menteri Keuangan, Wakil Menteri Pertahanan, Panglima TNI dan Kepala Staf

Angkatan Laut (KASAL) perihal ini. “Setelah mendengarkan penjelasan dan melakukan pendalaman dalam sesi tanya jawab, serta mendengarkan pandangan fraksi-fraksi, Komisi I memutuskan menyetujui usulan penjualan eks KRI Teluk sampit-515 pada Kementerian Pertahanan,” papar Bambang di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (29/3).

Diketahui, nilai perolehan KRI Teluk Sampit 515 pada tahun 1978 mencapai Rp173 miliar. Merujuk pada Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) Nomor 23 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, kapal yang sebelumnya merupakan bagian dari alutsista TNI itu merupakan kategori BMN yang penjualannya harus melalui persetujuan DPR.

Terkait penjualan KRI Teluk Sampit 515, rencananya lelang akan dilakukan di Dermaga Koarmada II Surabaya, Jawa Timur dan hasil lelang akan masuk ke kas negara. Dengan kondisi material yang rusak berat, taksiran nilai penjualan untuk kapal ini berada di kisaran Rp740 juta. ■ [we,uc/aha](#)

Arab Saudi Modif Manajemen Ibadah Umrah, Gus Muhaimin: Lebih Modern dan Manusiawi



Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar meninjau kesiapan penyelenggaraan haji. Foto: Ist/nvl

Ibadah haji dan umrah menjadi satu tujuan utama umat Islam dalam menjalankan perintah Allah. Ibadah ini juga menjadi sarana menuangkan wujud cinta sekaligus rindu terhadap Nabi Muhammad SAW yang makamnya berada di area Masjid Nabawi, Madinah. Di Masjid Nabawi, terdapat satu tempat yang disebut taman surga atau Raudlah. Tempat ini sangat mulia dan punya kedudukan agung di mata umat Islam, dan berlokasi tepat di antara rumah Rasulullah SAW dengan mimbarinya.

Tidak heran setiap pelaksanaan haji dan umrah, jemaah dari berbagai

penjuru dunia kerap berjubel dan berebut supaya memperoleh kesempatan ziarah ke Raudlah dengan cara salat baik fardu maupun sunah, berselawat untuk Baginda Rasulullah SAW, berzikir, dan berdoa kepada Allah SWT. Namun kini Pemerintah Arab Saudi mengubah manajemen ziarah Raudlah yang terletak di Masjid Nabawi.

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar mengapresiasi modernisasi manajemen ziarah itu sehingga kini menjadi lebih nyaman dan manusiawi. “Alhamdulillah kami dan rombongan

masuk Raudlah dengan aman, nyaman dan lancar. Ini akibat manajemen baru yang diterapkan,” kata Gus Muhaimin di Madinah, dalam rangka peninjauan kesiapan penyelenggaraan haji, Minggu (3/4). *Parlementaria* menerima keterangan persnya pada Senin (4/4).

Menurut Gus Muhaimin, jika dulu setiap jemaah bebas masuk Raudlah, kini Pemerintah Arab Saudi menerapkan sistem *screening* sebanyak tiga tahap. Tahap pertama adalah seleksi administrasi, dilanjutkan dengan duduk di satu titik yang ditentukan rombongan, lalu mulai berjalan menuju Raudlah.

“Ketika di Raudlah kita diberi waktu sekitar 10 menit. Jadi kita lebih leluasa sholat dan berdoa, bahkan sholatnya bisa beberapa kali. Yang jelas lebih nyaman, lebih pasti dan kesempatannya lebih baik,” tuturnya.

Karena itu, politisi Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengapresiasi manajemen baru yang diterapkan Pemerintah Arab Saudi

”

JIKA DULU SETIAP JEMAAH BEBAS MASUK RAUDLAH, KINI PEMERINTAH ARAB SAUDI MENERAPKAN SISTEM SCREENING SEBANYAK TIGA TAHAP

terkait dengan ziarah di Raudlah. Menurutnya manajemen ini lebih rasional dan manusiawi ketimbang dengan sebelumnya. “Biasanya salat saja harus miring-miring dan berdesak-desakan (di Raudlah) dan waktunya pendek dan bahkan waktunya tidak banyak. Apresiasi ini patut kita berikan kepada pemerintah Arab Saudi, MBS (Muhammad Bin Salman) dan semua keluarga kerajaan yang memberikan modernisasi regulasi ibadah umrah dan haji,” ujar legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur VIII tersebut. ■ sf

Komisi I Dukung Pengembangan Brigkav 1 Limpung Alugoro



Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari saat bertukar cenderamata dengan Kolonel Kav Agus Waluyo. Foto: Fitri/mvl

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menyatakan Komisi I DPR RI memberikan dukungan terhadap berbagai upaya pengembangan Markas Brigade Kavaleri (Brigkav) 1/Limpung Alugoro. Menurut Kharis, markas yang baru diresmikan pada 15 November 2021 tersebut memerlukan dukungan agar dapat optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

“Brigade Kavaleri 1/Limpung Alugoro sebagai satuan Kodam Jayakarta untuk terus mengoptimalkan tugas dan fungsinya guna mengantisipasi berbagai kerawanan yang muncul,” ucapnya usai pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI dengan Kolonel Kav Agus Waluyo dan

jajarannya di Markas Brigkav 1/Limpung Alugoro, Pondok Jagung, Tangerang Selatan, Banten, Jumat (1/4).

Diketahui, markas yang proses pembangunannya dimulai sejak tahun 2018 silam di atas lahan seluas sekitar 8,2 hektare itu merupakan satuan Brigkav Kavaleri pertama di Indonesia. Satuan tersebut, dijelaskannya, juga merupakan pelengkap dari dua Batalyon

Kavaleri yang ada yaitu Batalyon Kavaleri 7 dan Batalyon Kavaleri 9.

Kharis melanjutkan, keberadaan dari Brigkav 1/Limpung Alugoro ini akan menyempurnakan kekuatan bagi Kodam Jaya dalam melakukan tugas pengamanan bagi DKI Jakarta. “Saya kira ini merupakan satu yang kita butuhkan untuk menopang posisi Jakarta,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

Karenanya, Komisi I DPR pun berkomitmen untuk membawa berbagai hal yang dibutuhkan oleh Brigkav 1/Limpung Alugoro untuk ditindaklanjuti bersama Menteri Pertahanan, Panglima TNI dan KSAD. Hal itu menurut Kharis merupakan salah satu upaya dan bentuk perhatian Komisi I DPR dalam kemajuan dan pengembangan sektor pertahanan nasional. ■ *srw/sf*

”

**INI AKAN
MENYEMPURNAKAN
KEKUATAN BAGI
KODAM JAYA DALAM
MELAKUKAN TUGAS
PENGAMANAN**

Pemerintah Harus Senantiasa Sediakan Pelayanan Publik yang Berkualitas

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi II ke Kabupaten Gresik. Dalam kunjungan kerja spesifik ini, Komisi II melakukan tugas pengawasan terhadap pelayanan publik oleh Pemerintah Kabupaten Gresik. Pada kesempatan ini Komisi II menekankan agar pemerintah dan para birokrat senantiasa menyediakan pelayanan publik yang berkualitas.

“Pemerintah atau birokrat harus mampu menyediakan pelayanan publik yang berkualitas, yaitu terkait prosedur pelayanan, kepastian waktu dan biaya, ketepatan birokrat dalam menjawab apa yang dibutuhkan masyarakat,” papar Luqman saat memimpin rapat Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dengan Pemerintah Kabupaten Gresik, di Kantor Bupati Gresik, Provinsi Jawa Timur, Selasa (29/3).

Ia juga menekankan agar dalam pelayanan publik tidak ada diskriminasi, serta selalu memberikan kejelasan tentang mekanisme complain dalam pengaduan keluhan masyarakat. Bahkan lebih baik jika tidak ada antrean, masyarakat dilayani secara cepat.

Tim kunjungan kerja spesifik Komisi II juga meninjau langsung Mal Pelayanan Publik (MPP) Pemerintah Kabupaten Gresik. Keberadaan MPP tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia.

Dalam kunjungan ini, Komisi II DPR RI juga menyarankan agar pemerintah melakukan berbagai upaya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan.



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim saat bertukar cenderamata dengan Bupati Gresik. Foto: Eko/nvl

Beberapa upaya yang perlu dilakukan antara lain adalah dengan peningkatan kualitas SDM aparatur, peningkatan fasilitas penunjang, penilaian kepuasan terhadap layanan. “Serta menciptakan

kebijakan-kebijakan yang mendukung terpenuhinya kualitas pelayanan sesuai dengan prinsip, standar, serta azas pelayanan publik,” imbuh legislator dapil Jatim VI itu. ■ eko/aha

MPP Terbukti Permudah Pelayanan Publik di Karawang

Anggota Komisi II DPR RI MF Nurhuda mengapresiasi Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Karawang, Jawa Barat saat melaksanakan kunjungan kerja spesifik bersama Tim Kunspek Komisi II DPR RI. MPP tersebut kini telah beroperasi penuh dalam mengintegrasikan

69 jenis layanan dari 19 unit penyelenggara pelayanan. Berlokasi di Kabupaten Karawang yang merupakan wilayah industri terbesar se-Indonesia, kehadiran MPP Kabupaten Karawang tentu saja membawa dampak besar bagi iklim investasi dan kemudahan berusaha serta memudahkan pelayanan kepada publik.

Mal Pelayanan Publik Percepat Pertumbuhan Ekonomi Daerah



Anggota Komisi II DPR RI Bagus Adhi Mahendra Putra (kanan). Foto: Oji/nvl

Anggota Komisi II DPR RI Bagus Adhi Mahendra Putra menilai keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Denpasar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. MPP ini juga membantu mempercepat proses birokrasi bagi masyarakat yang akan membuka usaha. Dengan administrasi perijinan yang tertib diharapkan mampu meningkatkan percepatan ekonomi di daerah tersebut.

“Saya memberikan apresiasi kepada Mal Pelayanan Publik Kota Denpasar, semangat membangun MPP ini untuk mempercepat proses birokrasi dan pembelajaran bagi masyarakat agar mereka tertib administrasi, lengkap data kependudukan dan data usaha. Sedangkan tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar sejak kehadiran MPP ini diharapkan terus meningkat,” ungkap Bagus Adhi usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik

Komisi II DPR RI ke MPP Kota Denpasar Provinsi Bali, Selasa (29/3).

Politisi Partai Golkar ini menambahkan kehadiran MPP di Kota Denpasar terkait upaya pemerintah daerah mewujudkan kemudahan pelayanan pajak, sertifikat dan administrasi lainnya. Di masa pandemi covid-19 saat ini memang ada beberapa persoalan yang harus dikomunikasikan karena di MPP ini menggabungkan beberapa kementerian dan lembaga dalam satu atap. Contoh di perpajakan, Dirjen Pajak mengeluarkan kebijakan pelayanan pajak online ini perlu ada semangat yang sama dengan tujuan mempercepat pelayanan.

“Saya berharap ditingkatkan lagi komunikasi antara kementerian dan lembaga terkait kebijakan pelayanan di MPP Kota Denpasar ini sehingga model pelayanan satu atap yang efektif dan efisien bisa terus berkembang dengan mengedepankan prinsip satu sikap satu kebijakan,” tandas legislator daerah pemilihan (dapil) Bali ini. ■ oji/aha

“Luar biasa saya apresiasi kehadiran MPP Kabupaten Karawang yang dengan ini memudahkan pelayanan publik masyarakat, seperti yang kita tahu Kabupaten Karawang memiliki UMK terbesar kedua di Indonesia setelah Bekasi kita ingin tau apakah masyarakat di sini kesejahteraannya baik dan bagaimana respon masyarakat terhadap kehadiran MPP ini,” urai Nurhuda di Kantor Bupati Karawang, Jawa Barat, Selasa (29/3).

Nurhuda menanyakan kepada Bupati Karawang apakah kehadiran MPP ini apakah pemerintah kabupaten merasa terbantu dari aspek pelayanannya. “Kemudian saat

Covid-19 ini bagaimana pelayanannya dan protokol kesehatan yang diterapkan, kita tau saat ini memang Covid sudah mulai mereda namun jangan sampai kecolongan,” tambah politisi PKB ini.

Sementara itu, Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana mengatakan, MPP merupakan program prioritas RPJMD 2021-2026 Kabupaten Karawang. Melalui MPP ini, kata Cellica, Pemkab Karawang ingin mewujudkan pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas. Selain itu, di MPP juga telah disediakan balai nikah untuk masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan, juga pelayanan vaksinasi. ■ tn/aha

Anggota Komisi II DPR RI MF Nurhuda. Foto: Taufan/nvl



Bambang Heri Inginkan Polda Kalsel Tekan Peredaran Narkoba

Anggota Komisi III DPR RI Bambang Heri Purnama mengapresiasi jajaran Ditresnarkoba Polda Kalimantan Selatan yang telah mengungkap dan menggagalkan penyelundupan narkoba ke Kalsel. Ia menilai, Polda Kalsel termasuk salah satu dari jajaran kepolisian yang banyak mengungkap, menangkap serta menggagalkan peredaran narkoba di daerahnya.

“Saya harapkan juga perlu adanya penekanan, jangan sampai

narkoba di Kalsel terus meningkat. Saya juga mengharapkan agar pengedar atau bandar ditindak lebih tegas sehingga dia tidak bisa bermain lagi,” ujar Bambang Heri saat mengikuti pertemuan dengan jajaran Polda dan Kejati Kalsel di Mapolda Kalsel, Banjarmasin, Jumat (1/4).

Dirinya menilai, memenjarakan korban penyalahguna narkotika tidak akan menyelesaikan masalah. Bambang berharap ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, harus benar-benar dilakukan asesmen

apakah orang tersebut terlibat dalam jaringan pengedar ataupun hanya sebagai penyalahguna.

“Itu kan orang sakit, itu korban, kalau bisa direhab, jangan sampai lanjut. Saya mengharapkan dari Polda agar jangan ada kata-kata target. Misalnya ini harus ditangkap sekian orang, jangan! Walaupun di Banjar Baru dibangun Lapas baru, juga tidak akan menyelesaikan masalah,” ungkap Bambang Heri.

Selain itu, politisi Partai Golkar ini meminta agar Polda Kalsel terus menguatkan upaya pencegahan melalui sosialisasi pendekatan preventif kepada masyarakat akan bahaya narkoba. Ia juga mendorong kepolisian dapat meningkatkan alokasi anggaran mendukung kegiatan pencegahan narkoba ketimbang penegakan hukum.

“Lebih baik negara meningkatkan anggaran pencegahan ketimbang tiap tahun anggaran untuk operasional lapas bertambah Rp4 triliun sampai Rp5 triliun akibat terus bertambahnya narapidana narkotika,” pungkas Bambang Heri. ■ es



Anggota Komisi III DPR RI Bambang Heri Purnama saat mengikuti pertemuan Tim Kunspek Komisi III DPR RI dengan Polda dan Kejati Kalsel. Foto: Erman/nvl



Tinjau Bulog Randugarut, Komisi IV Pastikan Stok Bahan Pangan di Jateng Aman

Tim Kunspek Komisi IV DPR RI juga sempat meninjau salah satu pasar di Kota Semarang yang situasi pengunjungnya tidak terlalu ramai dan sesak, sehingga diharapkan masyarakat tidak perlu khawatir. Kemudian, Dedi menambahkan bahwa pemerintah harus terus mendorong daya beli masyarakat agar meningkat selama Ramadan hingga Lebaran mendatang.

“Saya sudah keliling pasar, semua stok aman, kebutuhan-kebutuhan lain juga relatif cukup. Jadi tenang saja, jangan berebut di pasar. Pasarnya

juga tidak terlalu sesak, relatif landai. Hanya saja masalahnya daya beli masyarakatnya yang harus didorong, karena banyak pekerjaan yang belum normal sampai dengan saat ini,” tutur politisi Partai Golkar tersebut.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Keuangan Bulog Bagya Mulyanto memberikan informasi



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi saat meninjau Bulog Randugarut. Foto: Novel/nvl

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi bersama Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI meninjau Gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) Randugarut di Semarang, guna memantau ketersediaan bahan pangan dan harga komoditas pangan menjelang bulan suci Ramadan hingga Lebaran nanti. Ia memastikan bahwa stok pangan khususnya beras dalam kondisi aman dan tercukupi untuk

wilayah Provinsi Jawa Tengah sendiri.

“Sudah saya tanya (ke pengelola Bulog Randugarut), berasnya masih cukup *enggak*? Katanya cukup, karena panennya sedang melimpah. Beras tahun kemarin dimakan (akan dikonsumsi) tahun sekarang, kemudian beras tahun ini datang lagi untuk tahun depan. Jadi selama (tahun) 2022 aman,” ungkap Dedi saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI meninjau Bulog Randugarut di Semarang, Jateng, Kamis (31/3).

ketersediaan beras yang ada di seluruh gudang Bulog di Indonesia dalam kondisi aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan. “Saat ini, ketersediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) mencapai sekitar 800 ribu ton. Beras yang sesuai penugasan tersebut, sampai saat ini masih tersedia. Selain itu, masyarakat petani kita juga sedang panen raya, sehingga stoknya cukup. Jadi, untuk beras tidak ada masalah dan harga stabil,” pungkas Bagya. ■ nvl/sf

Jelang Ramadan, Komisi IV Pantau Stok dan Harga Kebutuhan Pokok di Pasar Wonokromo



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Budisatrio Djiwandono saat meninjau Pasar Wonokromo. Foto: Ria/nvl

Pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang paling utama, karena pemenuhan pangan merupakan bagian dari hak setiap warga dan kewajiban bagi negara untuk mencukupinya. Mengingat pentingnya kecukupan pangan bagi masyarakat, maka negara harus hadir dan menempatkan pangan sebagai komponen dasar dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Namun, menjelang bulan Ramadan beberapa komoditas pangan

mengalami peningkatan harga. Tercatat komoditas telur ayam, bawang merah, bawang putih, cabe, gula, minyak goreng, beras, daging ayam dan daging sapi per 30 Maret 2022 di Jawa Timur mengalami peningkatan. Kenaikan harga jelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri kerap kali menjadi langganan setiap tahunnya karena dipicu oleh ketidakseimbangan antara permintaan dan ketersediaan pangan.

Untuk itu, Komisi IV DPR RI ingin memastikan kesiapan pemerintah di dalam mempersiapkan dan

mengantisipasi kebutuhan pasokan pangan yang diperkirakan akan meningkat selama bulan Ramadan dan Lebaran tahun ini. “Kami memandang perlu memantau ke lapangan, dalam hal ini Pasar Wonokromo, untuk meninjau ketersediaan bahan pokok dan keterjangkauan harga,” ungkap Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Budisatrio Djiwandono saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Pasar Wonokromo, Surabaya, Kamis (31/3).

Dari hasil tinjauan di lapangan, menurut Budi, saat ini stok bahan kebutuhan pokok masyarakat masih tersedia. Beberapa bahan yang dicek antara lain daging, telur, minyak goreng, terigu, beras, cabe, bawang dan sayur-mayur. “Kami melihat dari sisi ketersediaan bahan pokok cukup. Namun ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan (harga). Temuan ini akan kami sampaikan kepada pemerintah saat rapat agar bisa ditindaklanjuti terkait keterjangkauan harga,” jelas Budi.

Dalam kunjungan tersebut, Budi sempat berbincang dengan beberapa pedagang terkait ketersediaan dan harga bahan pangan menjelang bulan Ramadan. Beberapa pedagang mengeluhkan sejumlah bahan pangan yang sulit didapatkan, salah satunya minyak goreng. “Para pedagang menyampaikan terkait ketersediaan minyak goreng curah yang masih minim, sampai mereka harus mencari ke pihak ketiga,” jelas politisi Partai Gerindra tersebut. ■ rnm/sf



KAMI MEMANDANG PERLU MEMANTAU KE LAPANGAN, DALAM HAL INI PASAR WONOKROMO, UNTUK MENINJAU KETERSEDIAAN BAHAN POKOK DAN KETERJANGKAUAN HARGA

Tinjau Pasar Tradisional di Palembang, Komisi IV Temukan Kelangkaan Minyak Goreng Curah

mengambil kebijakan yang pro rakyat. Legislator dapil Jawa Timur VI itu menambahkan, sejak bulan Januari hingga Maret 2022, Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan 11 kebijakan dalam mengatasi kelangkaan minyak goreng.

“Saya setuju ada semacam *panic policy*. Yang tadi dilihat mulai dari Januari sampai Maret, ada 11 kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan. Artinya apa, tidak proper, tidak dipikir masak-masak juga tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat,” sambungnya.

Maka dari itu, Anggia meminta Kementerian Perdagangan segera duduk bersama pihak terkait lainnya dan mencari solusi terkait permasalahan

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IV Anggia Erma Rini memantau ketersediaan bahan pokok menjelang Ramadan di Pasar Tradisional Palimo, Palembang, Sumatera Selatan. Dari hasil peninjauan, sejumlah pedagang pasar menyampaikan kelangkaan minyak goreng curah.

Untuk sejumlah bahan pangan, masih aman dan stabil harganya. Seperti cabe, bawang merah, beras, semuanya dalam kondisi aman dan belum ada kenaikan harga yang signifikan. Tapi untuk minyak goreng curah tidak ada, ini yang masih kosong,” ujar Anggia di Perum Bulog Regional Sumsel dan Babel di Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (31/3).

Lebih lanjut ia bilang, kekosongan minyak goreng curah juga terjadi di provinsi lainnya. “Senin, kami masih menemukan antrian minyak goreng curah itu di Jogja, jam 09.00 WIB sampai jam 14.00 WIB dan hanya mendapatkan 3 liter minyak goreng. Di Banda Aceh dan Bandar Lampung juga sama. Saya cek, dan saya minta tim Satgas nasional dan memang benar di sana kosong,” terang Anggia.

Politisi PKB itu juga menyebutkan



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini memimpin Tim Kunspek Komisi IV DPR RI memantau ketersediaan bahan pokok di Pasar Tradisional Palimo. Foto: Anne/nvl

akan terus melakukan pengecekan rutin di sejumlah provinsi. Selain kelangkaan minyak goreng curah, Anggia turut mengkhawatirkan minyak goreng curah yang dikemas menjadi premium kemudian dijual dengan harga normal.

Terkait kelangkaan minyak goreng, Anggia mendesak pemerintah

tersebut. “Kami sudah terus menerus bertemu dengan asosiasi produsen minyak, kemudian juga distributor untuk mencari (solusi). Tapi ini kalau Menteri Perdagangannya bingung, bagaimana kami, rakyat. Tidak mungkin Indonesia tidak punya minyak goreng, tidak mungkin,” pungkasnya. ■ ann/aha

Hadirnya Akses Tol MNP Tingkatkan Daya Saing Kawasan Industri di Indonesia

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras bersama Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI meninjau proyek pembangunan jalan akses Tol Makassar New Port (MNP) di Makassar, Sulawesi Selatan. Proyek Strategis Nasional ini dinilai sangat bermanfaat terhadap posisi Makassar sebagai pintu gerbang di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Dengan terbangunnya Tol MNP diharapkan bisa membantu pengiriman logistik dan memudahkan pendistribusian ke daerah-daerah, serta meningkatkan konektivitas pelabuhan dengan jalan tol *existing*, sehingga waktu tempuh transportasi peti kemas akan lebih cepat dari kondisi sebelumnya.

“Saya harap hadirnya akses tol (MNP), tidak lagi mengganggu aktifitas masyarakat pada umumnya karena pengiriman logistik tidak lagi melalui



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras memimpin Tim Kunspek Komisi V DPR RI meninjau proyek pembangunan jalan akses Tol Makassar New Port. Foto: Runit/rvi

jalan kota yang selama ini menjadi kendala masyarakat di sini. Tentunya hadirnya proyek strategis nasional bisa meningkatkan daya saing kawasan industri di Indonesia baik dalam konteks regional dan internasional,” ungkap Andi Iwan di Tol MNP, Makassar, Sulsel, Kamis, (31/3). Turut mendampingi Direktur Jalan Bebas Hambatan

Kementerian PUPR Budi Harimawan Seimihardjo, Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol Triono Junoasmono, Pelindo, pemerintah daerah dan mitra terkait.

Andi Iwan menilai sebagian besar kendala yang dihadapi dalam proyek strategis nasional yakni proses pembebasan lahan. Akan tetapi persoalan tersebut tidak menjadi

Komisi V Tinjau Pembangunan Rusun Pekerja KIT Batang

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI menyoroti pembangunan *tower* rumah susun bagi pekerja di Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang di Kabupaten Batang,

Jawa Tengah, terutama fasilitas bagi para pekerja. berdasarkan peninjauan langsung rumah susun KIT Batang bangunan tersebut belum ada pemisahan untuk fasilitas toilet untuk laki-laki dan perempuan.

“Saya lihat tadi belum ada toilet untuk karyawan putri, oleh karena itu harus segera dipersiapkan toilet untuk perempuan, karena tadi dari hasil peninjauan ternyata belum ada,” ujar Anggota Komisi V DPR RI Fadholi usai mengikuti kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke KIT Batang, Jawa Tengah, Kamis (31/3).

Selain pemisahan toilet, legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah I tersebut juga meminta agar *tower* rumah susun untuk karyawan KIT Batang bisa digratiskan. Mengingat *tower* tersebut dibangun oleh pemerintah. ■ man/aha

kendala yang besar pada proyek Tol MNP. Saya melihat pembebasan lahan di proyek MNP, koordinasinya sudah sangat baik dari pihak Kementerian PUPR, pemerintah daerah, dan juga pihak Pelindo berjalan sangat lancar dan baik. Sehingga kecenderungan untuk masalah pembebasan lahan, bisa teratasi dengan baik melalui pendekatan yang persuasif dengan mempertimbangkan sisi kemanusiaan. Hal tersebut menjadi kunci keberhasilan penanganan dari pembebasan lahan. Dimana target pada Juni 2023 bisa terealisasi dan bisa langsung beroperasi,” pungkasnya.

Politisi Partai Gerindra itu berharap berharap lancarnya proyek di Tol MNP bisa dilaksanakan di daerah lain dan tidak hanya proyek di Kementerian PUPR, namun juga proyek di Kementerian Perhubungan. Bahkan pembebasan lahan Tol MNP ini bisa dijadikan *pilot project*. “Komisi V akan *men-support* agar Makassar New Port ini bisa *running well*, 100 persen bekerja, juga dapat melayani kebutuhan-kebutuhan masyarakat di sini. Saya harapkan hadirnya tol MNP ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, distribusi logistik, serta memperlancar jalur ekspor dan impor. Dan juga bisa menjadi salah satu solusi dalam mengurai kemacetan bagi angkutan barang atau logistik,” harap legislator daerah pemilihan (dapil) Sulsel III tersebut. ■ rmi/sf



Tim Kunspek Komisi V DPR RI meninjau Kawasan Industri Terpadu (KIT) di Batang. Foto: Andri/nvl

Komisi V Dorong Kesepakatan Gubernur Jatim dan Kepala Daerah Terkait ‘Long Storage’ Kalimati



Foto bersama Tim Kunspek Komisi V DPR RI dengan Pemprov Jawa Timur. Foto: Eki/nvl

Pembangunan Waduk Long Storage Kalimati di Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sejatinya telah rampung pada tahun 2019 lalu. Namun hingga Maret 2022, proyek yang memakan anggaran sebesar Rp278,15 miliar itu belum bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat, lantaran belum ditetapkannya rencana induk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) lintas kabupaten/kota oleh Gubernur Jawa Timur.

Dengan belum ditetapkannya induk SPAM lintas kabupaten/kota oleh Gubernur Jatim, maka berdampak pada terhambatnya Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam membangun instalasi perpipaan dan pompa untuk distribusi air kepada masyarakat. Menindaklanjuti hal tersebut, Anggota Komisi V DPR RI Sigit Susiantomo mendorong Kementerian PUPR berkoordinasi dengan Gubernur Jatim guna menyelesaikan persoalan tersebut, agar tidak tertunda lebih lama.

“Kami sudah berbicara dengan para *stakeholder* yang ada. Ini tinggal

tergantung kepada inisiatif Bu Gubernur Jawa Timur dan kepala daerah kabupaten/kota. Misalnya diusulkan kesepakatan secara MoU antar *stakeholder* yang ada mulai dari Pak Menteri PUPR. Setelah itu sambil menyerahkan surat untuk ditandatangani, Bu Gubernur menyerahkan pengelolaan dari *long storage* itu kepada pemerintah provinsi agar menjadi konsep SPAM regional,” papar Sigit usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI dengan Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur di Gedung Binaloka, Kota Surabaya, Jawa Timur, Kamis (31/3).

Selanjutnya, masih kata Sigit, dari SPAM regional itu dibuatkan pompa-pompa untuk dialirkan ke rumah tangga, sehingga masyarakat bisa merasakan manfaatnya. “Jadi rapat tadi saya kira sudah mengerucut ya, pemerintah di minta untuk inisiatif, khususnya Kementerian PUPR inisiatif membuat MoU antara gubernur dan kepala daerah,” pesan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, yang juga Wakil Rakyat dari dapil Jatim I. ■ eki/sf

Persiapan Pelaksanaan Ibadah Haji di Kaltim Dinilai Cukup Baik

yang akan diberangkatkan itu sampai sekarang belum pasti, tetapi kita berusaha dan Pemerintah Indonesia terus melakukan negosiasi dengan Pemerintahan Arab Saudi, mudah-mudahan kuota jemaah Indonesia bisa 100 persen, kita harapkan seperti itu, kalau perlu 200 persen, kenapa? Karena informasi yang kita peroleh dari Arab Saudi bahwa untuk sekarang ini untuk persiapan haji di seluruh dunia, hanya dua negara yang betul-betul siap untuk memberangkatkan

Anggota Komisi VIII DPR RI Samsu Niang menilai persiapan keberangkatan jemaah haji tahun 1443 H/2022 M di Provinsi Kalimantan Timur sudah dilakukan cukup baik, dengan melakukan beberapa hal oleh pihak terkait. Antara lain, melakukan identifikasi dokumen jemaah haji (passpor) yang masa berlakunya berakhir tahun 2022 dilakukan upaya perpanjangan; melakukan proses *scanning* paspor jemaah haji yang akan berangkat untuk dikirim ke Tim Visa di Kementerian Agama dan selanjutnya dikirim ke Kedutaan Arab Saudi agar jemaah haji memperoleh visa paspor untuk berangkat sesuai dengan kuota yang ditetapkan.

Kemudian pembinaan jemaah haji melalui manasik haji dilakukan dengan mengikuti protokol Kesehatan selama masa pandemi Covid-19; dan Membentuk regu serta rombongan berdasarkan domisili Jemaah Haji guna memudahkan koordinasi dan komunikasi. Demikian terungkap saat pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kaltim, para Kepala Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten se-Kaltim dan Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Balikpapan, di Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda, Kaltim, Selasa (29/3).

“Saya kira tadi Komisi VIII sudah mendengarkan persiapan haji untuk di Kalimantan Timur ini, alhamdulillah



Anggota Komisi VIII DPR RI Samsu Niang saat pertemuan Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI. Foto: Kiki/invl

sudah siap dan sudah cukup bagus semua. Sebanyak 2.450 jemaah haji akan diberangkatkan di Kalimantan Timur, alhamdulillah persiapannya sudah disiapkan, termasuk paspor, kemudian manasik, pembinaan calon jemaah haji secara menyeluruh,” kata Samsu Niang. Politisi PDI-Perjuangan itu juga memastikan bahwa jemaah haji Indonesia tahun 1443 H/2022 M akan diberangkatkan, meski belum ada kepastian berapa jumlah kuota yang diperoleh untuk jemaah haji Indonesia yang diberikan Arab Saudi.

“Berdasarkan pertemuan Kementerian Agama RI dengan Kementerian Haji Arab Saudi tanggal 20 Maret 2022, disitu sudah ada informasi bahwa Insya Allah tahun 2022 ini jemaah haji Indonesia akan diberangkatkan. Adapun jumlah kuota

jemaah hajinya, yaitu Indonesia dan Malaysia,” urai Samsu Niang.

Kendati demikian, Samsu Niang optimis kuota untuk jemaah haji Indonesia akan bertambah, pasalnya sejumlah negara tidak akan mengirimkan jemaah hajinya, dikarenakan terkena krisis ekonomi dampak dari pandemi Covid-19, “Kemudian ada informasi bahwa banyak negara yang karena akibat Covid-19 selama dua tahun lebih atau tiga tahun, negara yang terkena krisis ekonomi sehingga untuk memberangkatkan jemaah hajinya itu kemungkinan tidak bisa. Jadi mudah-mudahan jemaah haji yang tidak berangkat itu, jatahnya bisa diambil oleh jemaah haji Indonesia,” harap legislator daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Selatan II tersebut. ■ qq/sf

Komisi VIII Akan Tindaklanjuti Permasalahan Pengelolaan Madrasah di Kalteng

Anggota Komisi VIII DPR RI Hasan Basri Agus mengungkapkan Komisi VIII DPR RI akan segera menindaklanjuti persoalan-persoalan yang terjadi dalam pengelolaan pendidikan madrasah di Provinsi Kalimantan Tengah. Hasan berharap inventarisir dan komunikasi bisa menjadi kunci untuk solusi dalam penyelesaian masalah yang dihadapi di Kalteng. Persoalan madrasah yang tercatat adalah permasalahan tanah, mengubah status menjadi negeri, serta permasalahan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) madrasah.

“Oleh karena itu, pada kunjungan kerja ini, Komisi VIII ingin mengetahui dan mendengar langsung. Sudah dipaparkan oleh Kakanwil (Kepala Kantor Wilayah) Agama Provinsi

Kalimantan Tengah terkait kondisi, termasuk kendala dan hambatan yang disampaikan dan sudah kita dengar bersama.” ucap Hasan saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah beserta jajarannya, di Palangka Raya, Kalteng, Selasa (29/3).

Politisi Partai Golkar ini mengungkapkan, ke depannya Komisi VIII DPR RI akan menyampaikan persoalan tersebut kepada Kementerian Agama. Hal ini, sebut Hasan, sebagai salah satu tindak lanjut Komisi VIII DPR RI yang mendengar langsung penjelasan, terkait kondisi dan perkembangannya maupun kendala yang dihadapi. “Bahwa semua yang disampaikan (Kakanwil) juga dicatat oleh

rekan kita dan nanti itu kita tindaklanjuti pada saat rapat dengan Menteri yang bersangkutan.” tutur legislator daerah pemilihan (dapil) Jambi itu.

Dalam kesempatan itu, Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI juga meninjau Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Palangkaraya. “Jadi ini tantangan bagi kita ke depan dan kami sekali lagi dari Komisi VIII, mendukung sepenuhnya (penyelesaian permasalahan pengelolaan madrasah di Kalteng. Dan akan kami sampaikan usulan-usulan dan persoalan-persoalan yang disampaikan tadi. Kalau masalah guru, persoalannya memang di mana-mana. Menyangkut Menteri Keuangan, MenPAN-RB (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi), itu semua ada kaitannya juga.” tukas Hasan. ■ mcn/aha



Anggota Komisi VIII DPR RI Hasan Basri Agus saat memimpin Kunspek Komisi VIII DPR RI ke Palangka Raya, Kalteng. Foto: Munchen/nvl

Hafisz Tohir Nilai Dana Otsus Belum Tunjukkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Aceh



Wakil Ketua BKSAP DPR RI
Achmad Hafisz Tohir.
Foto: Ridwan/nvl

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Achmad Hafisz Tohir menilai dana Otonomi Khusus (Otsus) belum menunjukkan signifikansi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh. Di sisi lain, Indonesia bersama pemimpin dunia lainnya, telah menyepakati rencana aksi global melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable*

Development Goals (SDGs) berisi 17 tujuan dari 169 target yang diharapkan tercapai pada 2030 mendatang.

Di antara target SDGs tersebut adalah menghapus kemiskinan, mengakhiri kelaparan, dan mengurangi ketimpangan. “Sehingga, saya kira perlu suatu kajian yang lebih mendalam supaya Aceh ini bisa diberikan perhatian sebagaimana mestinya. Artinya dari sisi pendidikan, kesehatan, dari sisi lain apakah kita hanya cukup

sampai di (istilah) Otsus itu saja. Karena efektivitas (dana Otsus) itu sejauh ini tidak menggambarkan yang cukup signifikan,” urai Hafisz saat mengikuti Kunjungan Kerja BKSAP SDG’s Day bertema ‘Optimalisasi Peran Diplomasi Parlemen Melalui Pendidikan dan Pertukaran Budaya’ di Banda Aceh, Aceh, Selasa (29/3).

Adapun informasi dari situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pemanfaatan Dana Otsus Provinsi Aceh sejauh ini ditunjukkan untuk pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Adapun jumlah Dana Otsus untuk Aceh pada Tahun Anggaran 2022 telah disepakati sebesar Rp7,5 triliun.

Padahal, lanjut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, jika dana otsus Aceh tersebut optimal untuk pembangunan infrastruktur, maka sekaligus akan dapat menekan angka kriminalitas remaja yang disebabkan karena kecanduan *game online*. Pendekatan infrastruktur ini juga akan berdampak signifikan pula bagi keterbukaan akses pendidikan dan kesejahteraan masyarakat Aceh. “Karena dari infrastruktur tersebut hasil bumi bisa diangkut. Dengan infrastruktur tersebut kegiatan lebih cepat, juga ketimpangan yang terjadi di daerah akan bisa teratasi, sehingga angka kriminalitas bisa terkontrol,” tutup Anggota Komisi XI DPR RI tersebut. ■ rdn/sf

Luluk Nur Hamidah Tekankan Korban TPKS Perlu Pendampingan Psikolog

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Luluk Nur Hamidah menekankan pendampingan psikologis selama pemeriksaan korban dalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU

TPKS) harus diperhatikan. Baginya, hal ini jadi krusial demi meminimalisir pengulangan pengalaman traumatik pada korban.

“Kami ingin memastikan bahwa korban itu bisa didampingi oleh psikolog. Kemudian dari hasil *assessment* bisa menjadi pertimbangan bagi penyidik ketika melakukan pemeriksaan kepada korban,” tutur Luluk dalam Rapat Panja Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU TPKS di Ruang Rapat Baleg

Anggota Baleg DPR RI
Luluk Nur Hamidah. Foto: Kresno/mvl

DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (4/5).

Dalam rapat tersebut, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) tersebut menyampaikan pendampingan psikolog harus menjadi hak korban. Sehingga, ia berharap jika nantinya RUU TPKS ini terwujud nyata (disahkan), korban mendapatkan kemudahan akses untuk mendapatkan perlindungan.

“Kami melihat ada korban kekerasan seksual yang harus mengalami pengalaman traumatis setelah pada saat pemeriksaan. Jadi, kami ingin memastikan peran psikolog supaya bisa diintegrasikan ke dalam pembahasan ini,” tandas legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah IV itu.

Sebagai informasi, dirinya mengusulkan beberapa poin pertimbangan terkait pendampingan psikologis yang sesuai dengan catatan pada DIM nomor 317. Selanjutnya, usulan tersebut disepakati oleh Panja RUU TPKS sekaligus perwakilan pemerintah yang hadir.

Di antaranya, usulan berisi penyidik melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan berkonsultasi dengan psikolog, tidak menyampaikan pertanyaan berulang yang cenderung menghambat proses penyelidikan dan tidak membuat trauma kepada korban. Lalu, korban didampingi psikolog dan pendamping lainnya.

Terakhir, jika dalam hal pemeriksaan psikologis, korban memiliki trauma berat sehingga terhambat untuk menjalani pemeriksaan korban, maka pertanyaan dalam pemeriksaan disampaikan oleh psikolog dengan dihadiri oleh penyidik dan pendamping lainnya. ■ ts/sf



Setjen DPR Kembali Raih Penghargaan Wilayah Bebas Korupsi

diajukan untuk mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayan (WBBM). Kepada **Parlementaria**, Indra mengungkapkan harapannya agar seluruh unit kerja yang ada di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI bisa segera mendapatkan predikat-predikat tersebut.

“Kita membayangkan, bermimpi semua unit, pusat-pusat, biro-biro yang ada di Sekretariat Jenderal DPR RI semua sudah menjadi Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi juga melayani ya. Saya kira itu menjadi target kami dan inspektorat utama dan saya optimis dalam dua tahun ke depan hal itu bisa kita wujudkan,” imbuh Indra.

Senada dengan Indra, Inspektur Utama Setjen DPR RI Setyanta Nugraha melalui Inspektorat Utama DPR RI juga mendorong seluruh unit kerja di lingkungan DPR RI untuk dapat meraih predikat WBK maupun WBBM.

Totok, sapaan akrab Setyanta Nugraha mengungkapkan, Ittama merupakan unit yang diberikan amanah untuk melakukan pendampingan dan penilaian unit kerja yang akan diajukan menjadi WBK.

“Ke depan, kita (Inspektorat Utama DPR RI) terus mendorong seluruh unit kerja eselon II (di Sekretariat Jenderal DPR RI) itu melaksanakan zona Integritas menuju WBK/WBBM yang kita lakukan melalui sosialisasi kemudian pendampingan kemudian penilaian melalui tim penilai internal. Ketika sudah memenuhi ketentuan dan persyaratan maka kita ajukan ke Kementerian PAN-RB,” jelas Totok menutup pernyataannya. ■ uc/sf



Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar (kiri) saat menghadiri penyerahan piagam predikat Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi dari KemenPAN-RB. Foto: Mentari/nvl

Sebanyak dua unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI berhasil meraih predikat Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Penghargaan ini diberikan kepada Biro Persidangan II dan Pusat Kajian Anggaran setelah dilakukan pengajuan dan penilaian pada tahun 2021.

“Saya kira ini adalah capaian yang patut kami syukuri dan kita banggakan untuk menjadi *role model* bagi teman-teman lain, unit-unit di sekitar lingkungan Sekretariat Jenderal DPR untuk juga bisa mengikuti jejak unit-unit yang sudah terverifikasi sebagai

Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi. Tentu sosialisasi tentang berbagai *evidence* untuk menuju sana akan terus kita lakukan bersama dengan Inspektorat Utama (Ittama) mengawal itu,” ungkap Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar setelah acara penyerahan piagam penghargaan di Ruang Rapat Pansus C, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (31/3).

Sebelumnya, dua unit kerja lain juga telah mendapat predikat WBK dari Kementerian PAN-RB yaitu Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional serta Pusat Pendidikan dan Pelatihan. Unit kerja yang sebelumnya telah mendapatkan predikat WBK ini juga

Pusdiklat Setjen DPR Sosialisasikan Program 'Magang di Rumah Rakyat' di Unram

Sekretariat Jenderal DPR RI memiliki Program Magang dan Studi Independen Bersertifikasi Kampus Merdeka yang bertajuk 'Magang di Rumah Rakyat DPR RI'. Sebagaimana diketahui sejak tahun 2021, Setjen

DPR RI mulai membuka program tersebut yang diperuntukkan bagi mahasiswa. Oleh karena itu, Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Setjen DPR RI, melakukan sosialisasi mengenai program tersebut ke berbagai universitas di Indonesia, salah satunya di Universitas Mataram (Unram), Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kepala Bidang Pelatihan Struktural dan Fungsional Pusdiklat Setjen DPR RI Budi Wuryanto mengatakan bahwa penyelenggaraan sosialisasi tersebut berjalan dengan lancar dan penuh antusiasme dari peserta. "Antusiasme tampak dari sivitas akademika, mulai dari rektor, dosen, hingga mahasiswa perwakilan dari setiap program studi," jelas Budi saat sosialisasi

Program 'Magang di Rumah Rakyat' di Universitas Mataram, NTB, Selasa (29/3).

Budi menjelaskan bahwa Pusdiklat Setjen DPR RI merupakan salah satu mitra dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dalam melakukan Program Magang dan Studi Independen Bersertifikasi (MSIB). Budi juga menyampaikan, dalam sosialisasi tersebut banyak pertanyaan yang

disampaikan terkait hal-hal teknis mengenai Program Magang di Rumah Rakyat yang ke depannya diharapkan dapat diberikan solusi oleh Kemendikbudristek. "Pusdiklat berperan sebagai salah satu mitra yang memberikan fasilitas untuk bisa melaksanakan program dari Kemendikbudristek, sehingga Kemendikbudristek juga agar lebih mencermati dan menyelesaikan hal-hal yang bersifat teknis tersebut," papar Budi.

Budi berharap Program 'Magang di Rumah Rakyat' tahun 2022 ini dapat lebih merata, mengingat dalam Program 'Magang di Rumah Rakyat' periode sebelumnya, mayoritas mahasiswa berasal dari Pulau Jawa. "Kami ingin melalui sosialisasi ini, mahasiswa dapat lebih memahami mengenai MSIB dan juga agar yang mengikuti program magang ini lebih merata, bahkan dari universitas di Indonesia Bagian Tengah hingga Timur," ujar Budi.

Budi menambahkan, sosialisasi Program 'Magang di Rumah Rakyat' ini akan terus dilakukan selama program MSIB dari Kemendikbudristek masih berlangsung. "Kita akan terus mendukung program ini karena program ini dapat mencerdaskan kehidupan bangsa," jelas Budi.

Diketahui, program magang ini akan mulai dilakukan pada Agustus hingga Desember 2022 mendatang, sehingga mahasiswa/i dapat mempersiapkan diri semaksimal mungkin sebelum masa pendaftaran Program 'Magang di Rumah Rakyat' tahun 2022 mulai dibuka. ■ ica/sf



Kepala Bidang Pelatihan Struktural dan Fungsional Pusdiklat Setjen DPR RI Budi Wuryanto saat menyampaikan sosialisasi Program 'Magang di Rumah Rakyat'. Foto: Icha/nvl

BAKN Lakukan Penelaahan Terkait Cukai Hasil Tembakau di Malang



Foto bersama Tim Kunjungan Kerja BAKN DPR RI di Malang, Jawa Timur. Foto: Agung/nvl

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI melakukan penelaahan terhadap hasil pemeriksaan BPK RI terhadap cukai hasil tembakau di Kabupaten Malang. Malang diketahui merupakan salah satu kawasan yang memiliki banyak industri atau perusahaan rokok dan produk tembakau lainnya.

“Ada dua sisi yang ingin kami lihat di sini (Malang). Pertama secara aturan (cukai) itu sudah cukup bersahabat dengan dunia usaha, kedua pakah jumlah cukai rokok yang diterbitkan

”

DARI TEMUAN DARI BPK ITU KAN ADANYA KELEMAHAN DALAM METODE PENGAWASANNYA DIMANA APABILA ADA CUKAI YANG GAGAL DAN DIMUSNAHKAN ITU TAMPAPNYA KURANG OPTIMAL PENGAWASANNYA

selama ini tidak ada penyimpangan,” ujar Ketua BAKN DPR RI Wahyu Sanjaya bertindak sebagai ketua tim kunjungan kali ini di Malang, Jatim, Senin (4/4).

Sebab, kata Wahyu, BPK RI telah melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (DTT) tentang cukai hasil tembakau dari tahun 2016, tahun 2019, dan tahun 2020 dimana terdapat beberapa permasalahan ketidakpatuhan yang diungkapkan dalam hasil pemeriksaan itu. “Jadi kami menelaahnya supaya dapat menghindari adanya potensi kerugian negara di situ,” sebut politisi Partai Demokrat tersebut.

Mengutip data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) menyebutkan, pendapatan pemerintah dari cukai senilai Rp185,9 triliun pada tahun 2020. Nilai tersebut meningkat dari capaian tahun sebelumnya Rp181 triliun. Adapun lebih dari 90 persen diketahui merupakan cukai yang berasal dari hasil tembakau.

“Maka kami berusaha melihat apakah sistem pengawasan Bea Cukai ini terutama cukai rokoknya sudah optimal berjalan.

Soalnya kalau dari temuan dari BPK itu kan adanya kelemahan dalam metode pengawasannya dimana apabila ada cukai yang gagal dan dimusnahkan itu tampaknya kurang optimal pengawasannya,” urainya.

Untuk itu, melalui kunjungan kali ini BAKN DPR RI perlu meminta masukan lebih lanjut dari Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, Kanwil Bea dan Cukai Jawa Timur II serta Pengusaha Rokok terkait dengan permasalahan Cukai Hasil Tembakau di Provinsi Jawa Timur. “Dengan masukan tersebut diharapkan BAKN DPR RI mendapatkan informasi yang lengkap dan utuh dalam melakukan penelaahan,” terang legislator dapil Sumsel II itu. ■ aha

BURT Apresiasi Layanan Jamkestama VVIP di RS Advent Bandung



Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso saat memimpin kunker BURT DPR RI ke RS Advent Bandung. Foto: Prima/nvl

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Agung Budi Santoso mengapresiasi penerapan layanan kepada para Anggota DPR RI sebagai peserta jaminan kesehatan utama (Jamkestama) di Rumah Sakit (RS) Advent Bandung. Ia menyambut positif langkah terobosan dari RS Advent Bandung yang menerapkan *Person in Charge* (PIC) khusus yang ikut menangani jika ada peserta Jamkestama VVIP yang datang untuk berobat hingga kepulangannya.

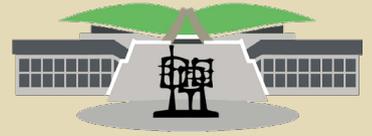
“RS Advent ini sudah sangat profesional, RS Advent dari hasil diskusi dan paparan direktur RS

Advent sudah sangat mengerti tentang Jamkestama VVIP sehingga di RS Advent ini kami tidak memiliki persoalan, justru kami meminta kepada Jasindo nanti untuk RS lainnya bisa merujuk dan mengikuti seperti RS Advent Bandung ini,” jelas Agung usai memimpin kunjungan kerja BURT DPR RI ke Bandung, Jawa Barat, Senin (4/4).

Agung menambahkan, jajaran direktur RS *provider* juga perlu konsisten memberikan pemahaman kepada bawahan mengenai standar pelayanan, khususnya *frontliner* sehingga tidak ada kendala jika sewaktu-waktu sedang menerima

pelayanan Jamkestama VVIP. Untuk itu, politisi Partai Demokrat ini meminta Jasindo mengimbau RS *provider* untuk melakukan hal serupa demi layanan yang optimal untuk Anggota DPR RI beserta keluarganya.

“Kami juga menekankan *frontliner* ini agar juga tahu pemahamannya seperti jajaran para direksi sehingga tidak ada lagi kendala, karena dengan menunjukkan kartu saja juga sudah mewakili bahwa memang benar merupakan anggota Jamkestama VVIP yang harus dengan segera mendapatkan pelayanan prima,” pungkas legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat I ini. ■ pdt/aha



Wakil Ketua DPR RI Korpolkam Lodewijk Freidrich Paulus memimpin pelantikan Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI Kahar Muzakir sebagai Ketua Komisi XI DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (31/3). Foto: Mario/nvl



Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana menerima kunjungan delegasi Parlemen Rumania di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (29/3). Foto: Andri/nvl



Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar beserta pejabat di lingkungan Setjen DPR RI saat menghadiri acara bedah buku karya Prof. Jimly Asshiddiqie di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (31/3). Foto: Prima/nvl

